

**PENGALOKASIAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI
PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK DESA
KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

Ramadhanti Dara Sakinah¹⁾, Sri Endang Kornita²⁾, Ufira Isbah²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : darasakinah3112@gmail.com

*Allocation Of Village Funds And The Impact Of The Increasing Revenue Up To Of
Kesumbo Village Bathin Solapan Sub District Bengkalis District*

ABSTRACT

This study aims to determine the allocation of village funds and their impact on increasing the income of Kesumbo Ampai villagers, Bathin Solapan Sub District, Bengkalis District. The study population was all families in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency, as many as 885 families. The sampling technique in this study was purposive sampling using the calculation of the Slovin formula so that as many as 90 respondents were obtained. The measurement carried out in this study was to use a questionnaire while the analysis technique was to use descriptive analysis and non-parametric test analysis using the Wilcoxon test using the SPSS program. Based on the results of the study it was found that the allocation of village funds in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan Subdistrict, Bengkalis Regency was carried out for infrastructure development such as roads, concrete tripe, box colvert, trenches and culverts during 2016 - 2018. The allocation of village funds had an impact on increasing income community in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. This can be seen from the acquisition of income after the existence of village funds is greater than before the existence of the village fund program, it can be seen from the real value of the income.

Keywords: Village Funds, allocation, income

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di

wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 2009:107).

Untuk meningkatkan pembangunan daerah pemerintah memfokuskan pada pembangunan daerah dari perdesaan atau lebih memfokuskan desa untuk mengembangkan potensi dan membangun perekonomiannya melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga desa tersebut dapat menjadi desa yang produktif dan mandiri. Seperti yang diketahui bahwa desa merupakan komponen paling dasar di suatu negara yang sangat penting peranannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut pada pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah tersebut. Untuk menunjang terjadinya pembangunan desa yang nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat desa, pemerintah mencetuskan program yang dikenal dengan Dana Desa, dimana Dana Desa merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh desa yang ada di Indonesia yang bersumber dari APBN.

Setiap desa di seluruh Indonesia berhak menerima Dana Desa untuk tujuan menunjang kegiatan pembangunan desa, terutama desa untuk meningkatkan status desa yang pada awalnya sangat tertinggal menjadi desa yang lebih baik hingga mencapai desa yang mandiri. Dengan adanya Dana Desa yang disalurkan ini diharapkan desa dapat lebih meningkatkan lagi pembangunan terutama pembangunan yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa

pada umumnya masih berada pada kegiatan ekonomi sektor pertanian.

Setiap daerah di Indonesia yang menerima Dana Desa salah satunya desa - desa di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Meskipun Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah di Provinsi Riau bahkan di Indonesia memiliki pendapatan daerah tertinggi terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Salah satu desa di Kabupaten Bengkalis yang memanfaatkan Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat adalah desa Kesumbo Ampai yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan.

Pada mulanya Desa Kesumbo Ampai termasuk ke dalam Kecamatan Mandau, namun pada tahun 2017 Kecamatan Mandau di bagi menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Desa Kesumbo Ampai termasuk ke dalam daerah administratif Kecamatan Bathin Solapan.

Berikut ini dapat dilihat jumlah Dana Desa yang disalurkan kepada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2018 :

Tabel 1 Dana Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Dana Desa (Rp)
1	2015	300.082.771
2	2016	687.021.246
3	2017	847.047.000
4	2018	800.029.000

Sumber: *Desa Kesumbo Ampai, 2019*

Dana desa yang disalurkan diharapkan mampu mengatasi persoalan – persoalan yang terdapat

didesa tersebut, yang mana dana desa yang diterima oleh desa selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan desa yang mana kegiatan yang dilakukan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama menyangkut kegiatan perekonomian masyarakat desa sehingga kegiatan pemanfaatan dana desa dapat menciptakan tujuan dari pemanfaatan dana desa yaitu peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdapat di Desa Kesumbo Ampai, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat tentunya hal tersebut akan mendorong penekanan terhadap jumlah keluarga miskin yang terdapat didesa tersebut, hal itu disebabkan masyarakat tidak lagi berada dikondisi kekurangan akibat pendapatannya yang rendah, melainkan dengan peningkatan pendapatan yang dimiliki masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya yang sesuai.

Begitu juga halnya dengan masyarakat miskin yang terdapat di Desa Kesumbo Ampai, dimana untuk beberapa tahun terdapat keluarga yang terjebak didalam kemiskinan

Peningkatan tersebut terlihat dari jumlah keluarga miskin di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan yang mengalami penurunan di tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintahan desa Kesumbo Ampai, berikut dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Desa Kesumbo Ampai Tahun 2015 – 2018:

Tabel 2 Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Keluarga Miskin
1	2015	294
2	2016	294
3	2017	281
4	2018	256

Sumber: *Desa Kesumbo Ampai, 2019*

Jumlah keluarga miskin di Desa Kesumbo Ampai mengalami penurunan menjadi 281 keluarga di tahun 2017 dan 256 di tahun 2018. Meskipun penurunan keluarga miskin tidak begitu besar namun adanya penurunan yang terus terjadi di beberapa tahun terakhir tidak akan menutup kemungkinan *trend* kemiskinan di Desa Kesumbo Ampai akan terus menurun sehingga jumlah keluarga miskin dapat berkurang.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, sebagaimana dikembangkan program Dana Desa yang disalurkan kepada seluruh desa-desa yang diharapkan desa tersebut dapat memanfaatkan dana yang diperolehnya dan dikembangkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga menciptakan desa yang mandiri. Selain itu perekonomian masyarakat desa tersebut juga mengalami peningkatan hal tersebut tentunya dapat dilihat dari peningkatan pendapatannya.

Desa Kesumbo Ampai merupakan salah satu desa yang memanfaatkan penerimaan Dana Desa yang bertujuan untuk pengembangan keadaan ekonomi masyarakat desa, salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah

menurunnya jumlah penduduk miskin di Desa Kesumbo Ampai. Hal ini menjelaskan bahwa adanya perubahan yang terjadi bagi penduduk di Desa tersebut. Hal tersebut menjelaskan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat setelah adanya penyaluran Dana Desa.

Namun hal itu masih gambaran secara umum, sehingga dari keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam menyangkut pengalokasian Dana Desa di Desa Kesumbo Ampai serta tujuan yang dicapai bagi penduduk desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di Desa Kesumbo Ampai yang mana adanya penurunan jumlah keluarga miskin. Sehingga peneliti ingin meneliti tentang “Pengalokasian Dana Desa dan Dampaknya Bagi Peningkatan Pendapatan Penduduk Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Bagaimanakah pengalokasian dana desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? 2) Bagaimanakah dampak pengalokasian dana desa terhadap pendapatan penduduk di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengalokasian dana desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 2)

Untuk mengetahui dampak pengalokasian dana desa terhadap pendapatan penduduk di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harrod Domar, Arthur Lewis, W.W Rostow, Hirschman, Rosenstain Rodan, Nurkse dan Leibenstein. Seperti judul buku karya monumental Arthur Lewis, Pembangunan Ekonomi dianggap merupakan kajian *the Theory of economic growth* (Kuncoro, 2006).

Subjek utama pembangunan adalah akselerasi pembangunan. Ekonom pembangunan saat itu memformulasikan melalui transformasi struktural dan keterlibatan lebih lanjut pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kebanyakan strategi pembangunan pada saat itu mengenai akumulasi modal: “tahap pertumbuhan Rostow, “pertumbuhan berimbang” Nurkse, ekonomi eksternal dan “big push” Rosentein-Rodan, penawaran tenaga kerja dan model dua sektor. Model dan hipotesis tersebut mempunyai dampak kebijakan yang lebih melibatkan pemerintah (Kuncoro, 2006).

Dalam buku (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010) Pembangunan menurut Michael Todaro didefinisikan sebagai berikut : “pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan, dan

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi sedang berkembang. Pembangunan menyangkut perubahan mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan ini menyangkut perubahan – perubahan dalam produksi dan permintasan maupun peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2016).

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah, maka di kembangkan melalui paling dasar atau daerah penting awal suatu daerah yaitu desa. pembangunan harus dimulai dari elemen paling kecil dalam tatanan perekonomian yaitu pembangunan ekonomi desa. pada saat perekonomian desa semakin membaik dan menciptakan kemandirian desa, maka tujuan daeri pembangunan daerah akan terwujud.

Dalam mendorong terwujudnya hal tersebut, tentunya peran pemerintah pusat sangat di butuhkan, seperti yang diketahui salah satu kendala pembangunan adalah keterbatasan pendanaan. Sehingga desa membutuhkan guliran dana untuk menciptakan desa mandiri dan menciptakan pembangunan desa. Sehingga, transfer dana dari pusat

sangat di butuhkan pemerintah desa. Salah satu program pemerintah adalah melalui program dana desa.

C. Pengertian Desa

Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:4 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian menurut Widjaja (2003 : 3) dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat (Widjaja, 2003 : 12).

D. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari

masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank (Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan yang ada dalam PP 60 Tahun 2014 sedang dalam proses revisi. Di antara pokok revisi tersebut selain pembagiannya yang dilakukan 90% secara merata dan 10% proporsional, tahap III penyaluran (20%) dimajukan dimana sebelumnya bulan November menjadi bulan Oktober Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan Keuangan perlu juga diatur mekanismenya. Mekanisme penyaluran beserta persyaratan untuk dana-dana tersebut lebih lanjut akan diatur dalam

Peraturan Bupati/Walikota (Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Gambar 1



Sumber : *Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015*

E. Pendapatan

Menurut Sukirno (2015) dalam teori ekonomi mikro bahwa pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya factor produksi atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno dalam buku “Teori Ekonomi” semakin tinggi pendapatan diposibel yang diterima oleh rumah tangga, makin besar konsumsi yang dibelanjakan. (Sukirno, 2015: 86).

Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan akan menentukan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang individu artinya makin besar pendapatan makin besar pula konsumsi dan tingkat kepuasan yang diperolehnya.

Oleh sebab itu setiap individu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan melalui berbagai usaha dengan factor-faktor produksi yang dimilikinya yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian. Selain itu, pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan modal atau kekayaan. Jika melihat pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan seseorang adalah jumlah penggunaan kekayaan jasa-jasa yang dimilikinya baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi lainnya.

Ekonomi sebagaimana yang diketahui adalah kegiatan manusia dengan masyarakat untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsure-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai rupa kebutuhan. Keadaan ekonomi dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan, jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan dalam keluarga. Pendapatan sering dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Pendapatan merupakan selisih penerimaan dengan semua biaya produksi. Pendapatan meliputi pendapatan kotor (penerimaan total) dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi (Rahim dan Hastuti, 2012: 126).

Pendapatan perseorangan dapat dibedakan atas (Arsyad, 2016: 182):

1. Upah adalah sejumlah uang. Barang-barang dan jasa-jasa

yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu atas pemakaian tenaga.

2. Dividen adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik saham sebagai balas jasa dari pengikutsertaan modal dalam perusahaan.
3. Sewa adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik harta atas harta yang dipersewakan dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan orang lain.
4. Bunga adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik modal.
5. Pendapatan pengusaha merupakan pendapatan yang diterima para pengusaha.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang akan diteliti ini dilakukan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana lokasi penelitian ini dipilih karena Desa Kesumbo Ampai merupakan salah satu desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mengalokasikan perolehan dana desa dalam kegiatan pembangunan desa, salah satu wujudnya adalah terjadinya penekanan jumlah keluarga miskin.

Defenisi Operasional Variabel

1. Dana desa yaitu dana yang diterima desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa – desa dalam satuan Rupiah pada tahun tertentu.
2. Pengalokasian dana desa yaitu distribusi dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintahan

desa dan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa dalam satuan unit kegiatan.

3. Pendapatan yaitu penghasil tetap yang diperoleh oleh responden pada saat peneliti melakukan penelitian dengan satuan Rupiah.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian berikut ini analisis data yang digunakan :

1. Pengalokasian dana desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dimana untuk menjawab tujuan penelitian ini, data distribusi pemanfaatan dana desa selanjutnya dilakukan tabulasi data untuk melihat pengalokasian Dana Desa yang dilakukan dan selanjutnya data akan disajikan untuk dipaparkan atau dideskripsikan.

2. Dampak pengalokasian Dana Desa terhadap peningkatan pendapatan Penduduk di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, dilakukan analisis data menggunakan uji tanda. Uji tanda adalah cara untuk menguji dua sampel yang saling berhubungan. Pertanyaannya adalah apakah terdapat dampak pengalokasian dana desa terhadap peningkatan pendapatan penduduk di desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dampak dilihat antara sebelum dan sesudah pengalokasian dana desa di desa Kesumbo Ampai.

HASIL PENELITIAN

Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa yaitu kegiatan pengalokasian dana desa yang di gunakan untuk pembangunan, dimana seperti yang di ketahui dari laporan pemanfaatan dana desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Selopan.

1. Pembangunan Sarana Transportasi

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi terdiri dari jalan babat beton pada tahun 2017 sepanjang 180 x 3 x 0,15 Meter, selanjutnya pembangunan Box Colvert pada tahun 2016 1,5 x 1,5 x 7 Meter dan tahun 2017 sepanjang 1,3 x 1,3 x 5 Meter. Dan untuk pengerasan jalas sepanjang 365 x 5 x 0,15 Meter.

2. Pembangunan Sarana Lingkungan

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan, yang terdiri dari pembangunan parit tahun 2016 sepanjang 300 meter, tahun 2017 sepanjang 60 x 0,4 x 0,5 meter dan tahun 2018 sepanjang 2.365 Meter. Dan pembangunan gorong – gorong sepanjang 4 meter tahun 2016.

Pendapatan Responden Setelah dan Sebelum Kegiatan Dana Desa

1. Pekerjaan Responden Saat Ini Setelah Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui jenis pekerjaan responden, dimana pekerjaa responden pada umumnya bekerja pada sektor informal yaitu petani yaitu petani sawit dan petani karet.

Selain itu ada juga responden yang bekerja sebagai buruh yaitu buruh tani, buruh di PT dan buruh bangunan. Sebagian besar responden bekerja sebagai buruh sebanyak 40 responden atau 44,44%, selanjutnya sebanyak 37 responden atau 41,11% bekerja sebagai petani dan pedagang sebanyak 13 responden atau 14,44%.

2. Pendapatan Utama Responden

Tingkat pendapatan responden saat ini setelah adanya dana desa yang merupakan pekerjaan utama responden per bulan berkisar antara Rp2.000.000 – Rp5.500.000 dimana paling banyak responden memiliki pendapatan berkisar antara Rp2.000.000 – Rp2.500.000 sebanyak 22 responden atau 24,44%, selanjutnya sebanyak 21 responden atau 23,33% memiliki pendapatan berkisar antara Rp2.501.000 – Rp3.001.000. paling sedikit responden memiliki pendapatan utama berkisar antara Rp5.006.000 – Rp5.500.000 yaitu sebanyak 2 responden atau 2,22%.

3. Keterlibatan dalam kegiatan Dana Desa

Jumlah responden yang ikut serta dalam kegiatan pengalokasian dana desa, dimana dana desa melibatkan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dana desa di ketahui bahwa dari 90 responden di ketahui bahwa sebanyak 62 responden atau 68,89% terlibat dalam kegiatan pemanfaatan dana desa dan sebanyak 28 responden atau 31,11% tidak terlibat dalam kegiatan pemanfaatan dana desa.

4. Pendapatan Sampingan dari Kegiatan Dana Desa

Pendapatan responden dari pekerjaan sampingan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan dana desa, yang mana responden ikut

dalam pengerjaan kegiatan pemanfaatan dana desa. dimana pendapatan dari kegiatan dana desa berkisar antara Rp500.000 – Rp1.200.000. paling banyak responden sebanyak 18 responden atau 20,00% memiliki pendapatan sampingan sebesar Rp702.000 – Rp802.000, selanjutnya sebanyak 14 responden atau 15,56% memiliki pendapatan sebanyak Rp904.000 – Rp1.004.000. Dan paling sedikit sebanyak 1 responden atau 1,11% memiliki pendapatan berkisar antara Rp1.005.000 – Rp1.105.000. Namun sebanyak 28 responden atau 31,11% tidak memiliki pendapatan dari kegiatan dana desa.

5. Total Pendapatan Responden Per Bulan Saat Ini

Total pendapatan adalah keseluruhan sumber pendapatan yang di peroleh bak dari pendapatan utama maupun pendapatan sampingan terutama yang bersumber dari keikutsertaan dalam pemanfaatan dana desa. berkisar antara Rp2.800.000 – Rp5.500.000. Dimana sebagian besar responden memiliki pendapatan yang berkisar antara Rp3.973.000 – Rp4.363.000 yaitu sebanyak 28 responden atau 31,11%. Selanjutnya sebanyak 13 responden atau 14,44% masing – masing memiliki pendapatan berkisar antara Rp2.800.000 – Rp3.190.000 dan Rp3.191.000 – Rp3.581.000. dan paling sedikit sebanyak 2 responden atau 2,22% memiliki pendapatan berkisar antara Rp5.146.000 – Rp5.500.000.

6. Pendapatan Sebelum Adanya Dana Desa

Pendapatan sebelum adanya dana desa adalah perolehan pendapatan responden perbulannya sebelum kegiatan dana desa di lakukan.

berkisar antara Rp1.500.000 – Rp4.500.000. adapun paling banyak responden memiliki pendapatan berkisar antara Rp2.793.000 – Rp3.223.000 yaitu sebanyak 22 responden atau 24,44%. Selanjutnya sebanyak Rp1.931.000 – Rp2.361.000. Responden yang memiliki pendapatan berkisar antara Rp1.500.000 – Rp1.930.000 yaitu sebanyak 17 responden atau 18,89%. Dan paling sedikit sebanyak 2 responden atau 2,22% berkisar antara Rp4.086.000 – Rp4.500.000.

7. Jumlah Pendapatan Responden Meningkat sebelum Dana Desa dan Sesudah Dana Desa

Adapun perubahan atau peningkatan pendapatan di lihat dari konversi pendapatan terhadap penerimaan besar dengan tingkat harga tertentu pada tahun 2016 dan saat penelitian ini di lakukan. bahwa sebanyak 63 responden atau 70,00% mengalami peningkatan pendapatan yang di lihat dari nilai pendapatan yang di miliki lebih besar dari pada pendapatan sebelum adanya dana desa atas perolehan beras pada tingkat harga pada tahun berlaku dan sebanyak 27 responden atau 30,00% mengalami penurunan pendapatan yang artinya pendapatan saat ini lebih rendah dari pada pendapatan sebelum adanya dana desa atas perolehan beras pada tingkat harga pada tahun berlaku.

Hasil Analisis Data

analisis uji nonparametric yaitu uji statistic atau Uji wicolxon, pengujian hipotesis sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Diketahui bahwa terdapat 63 responden dengan ranks data positif dan sebanyak 27 responden dengan

ranks data negatif yang artinya bahwa responden lebih banyak mengalami peningkatan pendapatan di bandingkan yang tidak mengalami peningkatan.

untuk melihat dampak penyaluran dana desa setelah adanya dana desa dengan sebelum adanya dana desa, yang di lakukan dengan analisis non parametric menggunakan analisis uji Wicolxon yang mana di peroleh hasil analisis data sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Analisis Uji Wilcolxon Pendapatan Sesudah dan Sebelum Adanya Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Selopan Kabupaten Bengkalis

Test Statistics^a

	sesudah - sebelum
Z	-4.022 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 3 di peroleh nilai Asym. Sig.(2-tailed) di peroleh nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya adanya peningkatan pendapatan setelah adanya dana desa di bandingkan dengan sebelum adanya dana desa.

PEMBAHASAN

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh

pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Dana desa yang di peroleh oleh desa Kesumbo Ampai di Kecamatan Bathin Selopan yang mana selanjutnya di salurkan dalam kegiatan pembangunan desa yaitu pembangunan sarana atau infrastruktur transportasi dan saluran irigasi. Berikut ini dapat di lihat perkembangan pembangunan insfratruktur baik itu transportasi lingkungan.

Kegiatan pembangunan Dana Desa sesuai dengan ketentuan undang undang menjelaskan bahwa pengalokasian dana desa di lakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya, hal tersebut karena prinsip pengelolaan dana desa yaitu swakelola dengan tujuan masyarakat setempat memperoleh sumber penerimaan dari kegiatan pemanfaatan dana desa.

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pekerjaan pemanfaatan dana desa selanjutnya akan mendatangkan sumber penerimaan bagi masyarakat, hal tersebut yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. masyarakat di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Selopan Kabupaten Bengkalis pada umumnya bekerja sebagai petani yang terdiri dari petani sawit dan petani karet, selain itu sebagai buruh PT, buruh Tani da buruh bangunan. Selanjutnya

masyarakat sebagai pedangan kebutuhan harian.

Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan insfratruktu desa juga memperoleh pendapatan dari pembangunan desa di lokasi tempat tinggalnya, masyarakat berha ikut terlibat dalam pembangunan yaitu pekerja kegiatan tersebut. Yang selanjutnya masyarakat memperoleh penambahan pendapatan. Adapun upah yang di terima masyarakat bekerja dalam kegiatan pembangunan desa adalah Rp100.000 per hari.

Terdapat perubahan pendapatan masyarakat setelah adanya pemanfaatan dana desa di bandingkan dengan sebelum adanya dana desa. peningkatan pendapatan ini di lihat dari kemampuan rill pendapatan tersebut di belanjakan kepada salah satu barang kebutuhan pokok yaitu besar. Pendapatan sebelum dana dena di peroleh perolehan besar saat harga tersebut di bandingkan dengan perolehan besar dari pendapatan setelah adanya dana desa. Sehingga ketahui bahwa sebanyak 63 responden atau 70,00% mengalami peningkatan pendapatan yang di lihat dari nilai pendapatan yang di miliki lebih besar dari pada pendapatan sebelum adanya dana desa atas perolehan beras pada tingkat harga pada tahun berlaku dan sebanyak 27 responden atau 30,00% mengalami penurunan pendapatan yang artinya pendapatan saat ini lebih rendah dari pada pendapatan sebelum adanya dana desa atas perolehan beras pada tingkat harga pada tahun berlaku

Hasil tersebut di dukung oleh analisis non parametric dengan uji wilcolxon yang menunjukkan niai

Asym. Sig.(2-tailed) di peroleh nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya adanya peningkatan pendapatan setelah adanya dana desa di bandingkan dengan sebelum adanya dana desa. hasil ini mnjelaskan bahwa adanya dampak dari pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa Kesumbo Ampai. Hal tersebut karena pendapatan masyarakat setelah adanya dana desa mengalami peningkatan atau lebih besar di bandingkan dengan sebelum adanya dana desa.

Meskipun demikian jika di lihat secara keseluruhan terdapat beberapa masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan hal tersebut di sebabkan dari perolehan hasil pertanian yang tidak lagi seperti sebelumnya, seperti petani sawit yang kebun sawitnya telah berumur tua dan tidak memiliki produktivitas yang tinggi. Selain itu petani karet yang harga karet mengalami kemerosotan saat ini sehingga nilai produksi menurun dan pendapatan juga mengalami peningkatan.

Akan tetapi masyarakat sangat terbantu dengan sistem swakelola yang di terapkan dalam pembangunan desa, hal tersebut karena masyarakat terlibat dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih sehingga menurupi kekurangan pendapatan dari pekerjaan utama.

Pedagang barang kebutuhan harian juga merasakan kenaikan pendapatan semenjak adanya dana desa, salah satunya yaitu daya beli masyarakat yang meningkat. Dengan enambahan pendapatan dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemanfaatan dana desa, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan

dan hal tersebut mendorong meningkatnya daya beli masyarakat di desa tersebut. Hal yang terjadi adalah perolehan pendapatan yang meningkat. secara tidak langsung ada pihak lain yang merasakan dampak pembangunan dana desa tersebut.

Namun yang yang perlu di tingkatkan adalah ketepatan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa. kepala desa selaku pihak yang berwenang dalam mengatur penyaluran dana desa, sebaiknya lebih di fokuskan kepada kebutuhan masyarakat dan menunjang ekonomi desa.

Selain itu, kegiatan pemanfaatan dana desa yang telah di lakukan di Desa Kesumbo ampai masih terfokus kepada pembangunan transportasi seperti jalan, babat beton, Box Colvert, penimbunan dan pembangunan lingkungan seperti pembangunan parit dan gorong – gorong. Sebaiknya pemerintah desa memikirkan hal lain yang lebih di butuhkan lagi selain yang telah di bangun sekarang.

Hal tersebut bertujuan untuk jangka panjang, karena tidak selamanya kegiatan pembangunan desa dapat terjadi dan sebaiknya pemerintah mempersiapkan skill masyarakat setempat jikalau dana desa telah tidak di lakukan kegiatan penyalurannya lagi. Sehingga masyarakat desa lebih produktif dan mewujudkan masyarakat yang mandiri. Jika hal tersebut dapat di capai yang terjadi adalah perekonomian desa akan membaik, perolehan pendapatan akan meningkat dan taraf hidup juga membaik. Selanjutnya yang terjadi perekonomian desa pun juga membaik. Dan tujuan dari dana desa itu sendiri akan tercapai yaitu

terciptanya kemandirian desa dan masyarakat yang sejahteraan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat di rumuskan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis di lakukan untuk pembangunan insfratraktur seperti jalan, babat beton, box colvert, parit dan gotong – gorong selama tahun 2016 – 2018.
2. Pengalokasian dana desa memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut terlihat dari perolehan pendapatan setelah adanya dana desa lebih besar di bandingkan dengan sebelum adanya program dana desa, hal tersebut terlihat dari nilai rill pendapatan tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat di rumuskan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya memperhatikan lagi pembangunan desa yang bersumber dari dana terutama dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Sebaiknya di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan yang menunjang perekonomian.

2. Pemerintah desa tidak hanya memfokuskan pengalokasian dana desa yang di manfaatkan untuk pembangunan desa, akan tetapi juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana kegiatan yang di lakukan lebih produktif menciptakan masyarakat – masyarakat yang kreatif di sesuaikan dengan kondisi, kekayaan alam dan budaya di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Selapan Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Archibugi, F, 2008. *Planning Theory, From the Political Debate to the Methodological Reconstruction*
- Arsyad, L, 2009, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan ekonomi daerah*, BPF, Yogyakarta.
- Arsyad, L, 2016, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Badrudin, R, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STM YKPN, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L, 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015

- Kuncoro, M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- _____, 2006, *Otonomi dan*
- Sirojuzilam dan Mahalli, K, 2010, *Regional, pembangunan dan Ekonomi*. USU Press, Medan.
- Sukirno, S, 2017, *Mikro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari klasik sampai Keynesian Baru*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tarigan, S., 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, M,P & Smith, S,C, 2011, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Sebelas, Erlangga, Jakarta.
- Widjaja, H, A, W, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa